

	News Title : Kepala Bappebti: Data Dukcapil Sangat Bermanfaat dalam Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	
	Media Name : indonews.id	Journalist : Marsi Edon
	Publish Date : 26 December 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Zudan Arif Fakrulloh (Direktur Jenderal Dukcapil)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Kerja Sama Dukcapil

NASIONAL1

Kepala Bappebti: Data Dukcapil Sangat Bermanfaat dalam Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi

Oleh : Marsi Edon - Serin, 26/12/2022 11:25 WIB



Penandatanganan PKS dengan Bappebti Kemendagri (Foto Kemendagri)

INDONEWS.ID - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung dan membantu tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan verifikasi terhadap nasabah perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK).

Dukungan ini dilakukan secara konkret dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Bappebti di auditorium Bappebti, Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Baca juga : [Dirjen Zudan Arif Fakrulloh Raih Penghargaan Internasional Honorable Mention dari Future of Government Awards](#)

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, penandatanganan PKS dengan Bappebti Kemendagri ini menandakan kerja sama yang dibangun Ditjen Dukcapil telah dilakukan dengan 5.369 lembaga.

"Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga pengguna data kependudukan Dukcapil sudah dimulai sebelum saya menjadi Dirjen Dukcapil sejak 1 Juli 2015. Waktu itu, 7,5 tahun lalu baru 40 lembaga yang bekerja sama. Data kependudukan kami kurang laku waktu itu, sulit mencari lembaga yang percaya dengan data Dukcapil," ungkap Zudan di hadapan Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko serta para pemangku kepentingan bidang perdagangan berjangka komoditi serta para pejabat eselon di lingkungan Bappebti Kemendagri.

Baca juga : [Dukcapil Kemendagri Ikut Dorong Perluas Fintech dengan Digital ID](#)

Dukcapil, kata Zudan, terus bertumbuh memperbaiki diri.

"Sambil berlayar sembari terus memperbaiki kapalnya. Jadi datanya belum sebaik sekarang," kata Zudan.

Baca juga : [Semangat Transformasi Dukcapil Tak Pernah Padam, KIA dijadikan Kartu Insentif Untuk Anak](#)

Dia mengatakan, dengan semakin banyak data Dukcapil digunakan, malah semakin baik, tambah akurat, dan bersih. Sebab, data Dukcapil akan terus diperbaiki. Penduduk yang meninggal bisa diketahui dan dikeluarkan dari database. Begitu pula dengan warga yang pindah rumah pun bisa diketahui.

Zudan berharap dengan metode e-KYC (electronic know your customer) Dukcapil bisa membantu Bappebti membangun transparansi di bidang perdagangan berjangka komoditi, SRG, dan PLK. Dia mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendorong upaya e-KYC nasabah di Bapepti terus dilanjutkan.

"Kerja sama ini akan mendorong tumbuhnya transaksi di Bappebti yang lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel," ujar Zudan menyampaikan pesan Mendagri.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, harmonisasi dalam penggunaan data kependudukan bakal banyak berperan penting mendukung tugas dan fungsi Bappebti.

"Tugas Bappebti mengawasi PBK, SRG, dan PLK. Untuk itu kami memerlukan akses ke data kependudukan Dukcapil sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan," jelas Didid.

Didid menambahkan, PKS mengatur lebih khusus layanan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. Hal ini sekaligus dalam proses penerimaan nasabah oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti.

Didid pun mendorong setiap pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi wajib memiliki dokumen PKS dengan Ditjen Dukcapil untuk hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2019 yang mensyaratkan dokumen perizinan usaha sebelum badan hukum Indonesia dapat melakukan PKS dengan Ditjen Dukcapil untuk mendapat hak akses pemanfaatan data kependudukan.

"Diharapkan dengan PKS ini, data kependudukan dapat mendukung perkembangan layanan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Selain itu, seluruh jajaran bursa berjangka, lembaga kliring, dan asosiasi yang hadir diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung implementasi PKS ini dan dapat menginformasikan kepada seluruh anggotanya," tandas Didid.*

TERPOPULER

- 1 Serah Terima Jabatan Wadajan Kopassus dan Jabatan Perwira di Lingkungan Kopassus
- 2 Integrasi NIK dan NPWP
- 3 Tempat Wisata Kebangsaan Indonesia adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
- 4 Laksamana Pertama TNI Danto Wirawan, Alumnus SMA Teladan Berprestasi Dapat Jabatan Baru
- 5 Rizal Ramli Ungkap Tiga Skenario Perpanjang Jabatan Presiden

